



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

TARGET KINERJA PEMERINTAH  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditetapkan visi, misi Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2016-2021;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya perubahan RPJMD periode 2016-2021 perlu diselaraskan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. bahwa keberhasilan pencapaian visi, misi Kabupaten Humbang Hasundutan perlu diselaraskan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 2).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019-2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

6. Unit kerja adalah unit kerja terkecil pada Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
13. Indikator adalah ukuran yang digunakan dalam rangka mengevaluasi dan mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan yang bersifat spesifik dan terukur sesuai dengan program yang ditetapkan dalam setiap tingkatan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan penetapan target kinerja adalah :

- a. untuk menelaraskan penetapan program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran.
- b. untuk memperoleh akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berbasis SAKIP.

### Pasal 3

Ruang lingkup target kinerja terdiri dari :

- a. Target kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Target kinerja Perangkat Daerah; dan
- c. Target kinerja pada unit kerja.

## BAB III PENETAPAN TARGET KINERJA

### Pasal 4

- (1) Visi, misi Pemerintah Daerah dicapai melalui penetapan target kinerja yang selaras terhadap tujuan.
- (2) Target kinerja Perangkat Daerah ditetapkan berorientasi *outcome* yang selaras antara program dan kegiatan terhadap sasaran strategis Pemerintah Daerah.
- (3) Target kinerja program pada unit kerja ditetapkan berorientasi *outcome* yang selaras terhadap sasaran strategis Perangkat Daerah;
- (4) Target kinerja kegiatan pada unit kerja ditetapkan berorientasi *output* yang selaras terhadap program Perangkat Daerah.

### Pasal 5

Target kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

Perangkat Daerah dan unit kerja menetapkan target kinerja sasaran, program dan kegiatan selaras terhadap target kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penetapan target kinerja berlaku dalam periode RPJMD yang telah diselaraskan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 yang efektif pada tahun 2019-2021.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
Pada tanggal 25 September 2018

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
Pada tanggal 25 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,



TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN 2018 NOMOR. 24

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
 NOMOR : 24 TAHUN 2018  
 TENTANG TARGET KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019-2021

**TARGET KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019-2021**

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target Sasaran					Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung-jawab	Program			
									2017	2018	2019	2020	2021						
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Misi Pertama: Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1	Mewujudkan masyarakat yang taat beribadah	Persentase kehadiran umat beragama dalam kegiatan ibadah	1.1.1	Meningkatnya kehadiran jemaat dalam acara ibadah minggu	1.1.1.1	Persentase kehadiran jemaat dalam ibadah minggu	Rata-rata kehadiran jemaat yang mengikuti ibadah minggu tahun n/total jemaat tahun n x 100%	Persen	60	65	70	75	80	85	85	Bagian Kessos Setdakab	Program Peningkatan Kehidupan Beragama
					1.1.2	Meningkatnya kehadiran jamaah dalam acara ibadah sholat Jum'at	1.1.1.2	Persentase kehadiran jamaah dalam ibadah sholat Jum'at	Rata-rata kehadiran jamaah yang mengikuti sholat jumat tahun n/Total jamaah wajib sholat jumat tahun n x 100%	Persen	60	65	70	75	80	85	85		
2	Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam	2.1	Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	2.1.1	Meningkatnya akses pendidikan	2.1.1.1	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Tahun	10,17	10,17	10,20	10,25	10,30	10,35	10,35	Dinas Pendidikan, Perpustakaan	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
					2.1.1.2	Angka Melek Huruf	2.1.1.2	Angka Melek Huruf	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	persen	99,40	99,43	99,49	99,54	99,59	99,64	99,64		
					2.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	2.1.2.1	Nilai rata-rata UN SMP		Nilai	44,92	45,00	46,00	47,00	48,00	50,00	50,00		
					2.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.3.1	Angka harapan hidup	Jumah umur yang meninggal/Total orang yang meninggal	Tahun	67,8	68,5	69	69,5	70	70	70	Dinas Kesehatan, RSU Doloksanggul	Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Pengadaan, Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Program Perbekalan Kesehatan
					2.1.4	Mewujudkan PMKS mandiri	2.1.4.1	Persentase PMKS yang mandiri	Jumlah PMKS yang mandiri /Jumlah PMKS x 100%	persen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Sosial
					2.1.5	Menurunnya angka pengangguran	2.1.5.1	Angka pengangguran	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	Persen	1,22	1,21	1,20	1,18	1,16	1,14	1,14	Dinas Ketenagakerjaan	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK), Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Kerja (PKPTK), Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
					2.1.6	Menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga	2.1.6.1	Rasio anak per keluarga	Jumlah anak/Jumlah PUS	Orang	4,10	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,60	Dinas P2KB	Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB, Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak
					2.1.7	Meningkatnya kompetensi kepemudaan	2.1.7.1	Jumlah atlet berprestasi nasional	Jumlah atlet yang memperoleh medali maupun yang masuk Pelatnas	Orang	0	2	4	6	8	10	10		Program Peran serta Pemuda, Program Pengembangan Peningkatan Manajemen Olah Raga, Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
		2.2	Meningkatkan Rumah Tangga teraliri listrik dari pemanfaatan	Rasio elektrifikasi berbasis sumber daya					Jumlah Rumah Tinggal teraliri listrik dari pemanfaatan sumber daya air/Total Rumah Tinggal tahun n x 100%	Persen	N/A	N/A	75	80	90	100		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program	

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target Sasaran					Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung-jawab	Program				
									2017	2018	2019	2020	2021							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			sumber daya alam	alam	2.2.1	Meningkatnya Rumah Tangga teraliri listrik dari pemanfaatan sumber daya air	2.2.1.1	Persentase RT teraliri listrik dari pemanfaatan sumber daya air	Jumlah Rumah Tangga teraliri listrik dari pemanfaatan sumber daya air/Total Rumah Tangga tahun n x 100%	Persen	N/A	N/A	75	80	90	100	100	Dinas PMP2TSP	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	
		2.3	Meningkatkan penerimaan daerah dari pemanfaatan sumber daya alam	Persentase penerimaan daerah dari pemanfaatan sumber daya alam						Persen	5	10	10	15	15	15	65	BPKPAD	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					2.3.1	Meningkatnya realisasi DBH pajak pemanfaatan air permukaan		Nilai penerimaan daerah dari DBH pajak air permukaan	Jumlah penerimaan daerah dari DBH pajak air permukaan	dalam milyar	0.712	1.178	1.500	1.650	1.815	1.996	1.996			
					2.3.2	Meningkatnya jumlah pemanfaatan sumber daya mineral bukan logam dan batuan		Nilai penerimaan daerah dari pajak mineral bukan logam dan batuan	Jumlah realisasi PAD dari pajak mineral bukan logam dan batuan	dalam milyar	1.00	1.50	1.70	1.836	2.019	2.221	2.221			
		2.4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						Persen	74.50	74.70	75.00	75.30	75.60	75.90	75.90			
					2.4.1	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	2.4.1.1	Luas lahan kritis	Luas lahan kritis - luas lahan kritis yang tertanam	Ha	16.841,36	10	50	55	60	65	6.601,36 Ha			
					2.4.2	Meningkatnya kualitas air	2.4.2.1	Rata-rata indeks kualitas air Danau Toba	Pengujian/analisis sampel air Danau Toba	Kelas	B (-8)	B (-8)	B (-8)	B (-8)	B (-7)	B (-7)	B (-7)		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian	Program Pengembangan Sistem Penataan dan Penegakan Hukum, Program Perlindungan dan Konservasi SDA, Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
							2.4.2.2	Rata-rata indeks kualitas air sungai	Pengujian/analisis sampel air sungai	Kelas	B (-9)	B (-9)	B (-9)	B (-9)	B (-8)	B (-8)	B (-8)			
					2.4.3	Meningkatnya kualitas udara	2.4.3.1	Rata-rata indeks kualitas udara	Pengujian/analisis sampel udara	ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara)	20	20	20	20	19	19	19			
					2.4.4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat	2.4.4.1	Cakupan layanan infrastruktur sanitasi	Infrastruktur sanitasi dalam kondisi baik/Total infrastruktur sanitasi	Persen		37.88	42.75	51.25	56.75	64.25	64.25		Dinas Lingkungan Hidup, PKP, PUPR, Dinas Kesehatan	Program Pengelolaan Kinerja Air Minum dan Sanitasi, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengendalian Banjir, Program Penanggulangan Banjir, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengelolaan RTH
								Panjang drainase dalam kondisi baik/panjang drainase x 100%	Persen	63,40	70	75	85	90	100	100				
								Volume sampah terangkut/Total volume timbulan sampah x 100%	Persen	16,81	24.64	26	30	35	42	42				
								(Jumlah Fasilitas 3R x Jumlah Penduduk terlayani/Fasilitas 3R)/jumlah total penduduk x 100%	Persen				10	12	15	15				
								Jumlah RT yang terlayani MCK/Total RT yang terlayani x 100%			56.90	70	80	90	100	100				
3	Misi Ketiga : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	3.1	Meningkatkan profesionalisme birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi							C	CC	B	B	BB	BB	BB			
					3.1.1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	3.1.1.1	Peringkat LPPD	Hasil Penilaian Kemendagri	Peringkat (Provinsi)	9	8	7	6	5	5	5		Setdakab	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
							3.1.1.2	Nilai evaluasi AKIP	Hasil evaluasi Kemen PANRB	Predikat	C	CC	B	B	BB	BB	BB	Bappeda, Inspektorat Setdakab	Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Sosial Budaya, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Program Reformasi Birokrasi, Program Penataan Kelembagaan, Program Penataan Ketatalaksanaan	
							3.1.1.3	Opini BPK	Hasil Opini BPK atas Lapkeu	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPAD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
							3.1.1.4	Level Maturitas SPIP	Penilaian BPKP	Level	1	3	3	3	4	4	4	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
							3.1.1.5	Persentase Implementasi e-Government	Jumlah aplikasi yang diterapkan/target x 100%	Persen	20	25	40	50	60	75	75	Dinas Kominfo	Program E-Government, Program Persandian untuk pengamanan informasi	
4	Misi Keempat : Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan	4.1	Mewujudkan ketahanan pangan	Persentase pertumbuhan produksi bahan pangan							Persen	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3			
					4.1.1	Meningkatnya produksi bahan pangan utama :	4.1.1.1	Laju pertumbuhan produksi bahan pangan utama :	(Jumlah produksi komoditi bahan pangan tahun n) -(Jumlah produksi komoditi bahan pangan tahun n-1)/Jumlah produksi tahun n-1 x 100%											
								Padi		Persen	1.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.3	Dinas Pertanian,	Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Penerapan Teknologi Pertanian, Program Peningkatan Produksi Hasil	

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target Sasaran					Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab	Program					
									2017	2018	2019	2020	2021								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
								Jagung		Persen	1.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.3	Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketapang, Dinas PMDP2A	Peternakan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Pembagian Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya, Program Pengembangan Budidaya Perikanan/Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Promosi Perikanan		
							Ubi		Persen	1.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.3				
							lkan		Ton	1427	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	1784				
							4.1.1.2 Laju pertumbuhan populasi ternak : Kerbau		Ekor	11,085	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	14,708				
							Sapi		Ekor	1,370	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	1,718				
							Babi		Ekor	36,554	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	55,176				
							Ayam buras		Ekor	241,650	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	321,804				
							Itik		Ekor	31,178	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	49,751				
									Persen	5.04	5.05	5.06	5.07	5.08	5.09	5.09					
		4.2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	4.2.1 Meningkatnya PDRB	4.2.1.1 Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	(PDRB sektor pertanian tahun n)-(PDRB sektor pertanian tahun n-1)/PDRB sektor pertanian tahun n-1 x 100%	Persen	3.47	3.57	3.67	3.80	3.90	4.00	4.00	4.00	4.00	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	
					4.2.1.2 Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	(PDRB sektor perdagangan tahun n)-(PDRB sektor perdagangan tahun n-1) x 100%	Persen	8.14	8.19	8.24	8.29	8.34	8.39	8.39	8.39	8.39	Dinas Kopedagin	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Ekspor			
					4.2.1.3 Laju pertumbuhan PDRB sektor industri	(PDRB sektor perdagangan tahun n)-(PDRB sektor perdagangan tahun n-1) x 100%	Persen	4.22	4.24	4.26	4.28	4.3	4.32	4.32	4.32	4.32	Dinas Kopedagin	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Daerah			
					4.2.1.4 Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	(PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n)-(PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n-1)/PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n-1 x 100%	Persen	7.25	7.27	7.29	7.31	7.33	7.35	7.35	7.35	7.35	BPKPAD, Dinas Pariwisata, Dinas Kopedagin	Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UKM, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
				4.2.2 Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	4.2.2.1 Persentase peningkatan investasi yang ditanamkan	Jumlah realisasi investasi dari sektor strategis tahun n/Jumlah realisasi investasi dari sektor strategis tahun n-1 x 100%	Persen	20.60	20.60	26.40	39.83	57.08	75.70	75.70	75.70	75.70	Dinas PMP2TSP	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
5	Misi Kelima : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah	5.1 Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Persentase desa terjauh yang terakses jalan kondisi baik			Jumlah jalan penghubung desa terjauh ke kecamatan dengan kondisi baik/Total jalan desa terjauh x 100%	Persen	41.92	48.11	56.67	66.67	73.33	81.67	81.67	81.67						
					5.1.1 Meningkatnya infrastruktur transportasi yang handal	5.1.1.1 Persentase jalan dalam kondisi baik	Persen	62.06	63.81	64.31	64.81	65.31	65.81	65.81	65.81	65.81	Dinas PUPR	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			
					5.1.1.2 Persentase jembatan dalam kondisi baik	Jumlah jembatan dalam kondisi baik/Jumlah jembatan x 100%	Persen	77.00	77.50	78.00	78.50	79.00	79.50	79.50	79.50	79.50	Dinas PUPR				
					5.1.1.3 Persentase jalan yang sudah terpasang alat keselamatan jalan	Panjang jalan yang sudah terpasang alat keselamatan jalan/Total panjang jalan x 100%	Persen	8.26	8.38	8.49	8.79	8.99	9.19	9.19	9.19	9.19	Dinas Perhubungan				
		5.2 Meningkatkan aksesibilitas perumahan	Persentase aksesibilitas perumahan			Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses perumahan/Total Rumah Tangga x 100%															
					5.2.1 Meningkatnya akses air minum	5.2.1.1 Persentase akses air minum	Jumlah sambungan rumah s.d tahun n/Jumlah sambungan rumah seharusnya x 100%	Persen	51.44	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas PKP	Program Pengelolaan Kinerja Air Minum dan Sanitasi		
					5.2.2 Meningkatnya akses jalan lingkungan	5.2.2.1 Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik /Total panjang jalan lingkungan x 100%	Persen	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00	Dinas PKP	Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya dan Program Pengembangan Perumahan		
					5.2.3 Mengentaskan RTLH	5.2.3.1 Persentase Rumah Tangga yang menghuni RLH	Jumlah Rumah Tangga yang menghuni Rumah Layak Huni/Total Rumah Tangga x 100%	Persen	54.33	59.33	70	85	90	100	100	100	100	Dinas PKP	Program lingkungan sehat perumahan		
		5.3 Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi kerakyatan	Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kerakyatan dalam kondisi baik				Persen	50.50	55.29	60.00	64.71	69.76	75.48	75.48	75.48	75.48	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			
					5.3.1 Meningkatnya irigasi lahan pertanian padi sawah	5.3.1.1 Persentase lahan pertanian produktif yang mendapat fasilitas/saluran irigasi	Luas lahan pertanian padi sawah produktif yang mendapat fasilitas/saluran irigasi/ Luas lahan pertanian padi sawah produktif x 100%	Persen	56.5	58	60	62	65	70	70	70	70	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		



No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target Sasaran					Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung-jawab	Program			
									2017	2018	2019	2020	2021						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					5.3.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata	5.3.2.1	Persentase sarana dan prasarana pariwisata dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana di objek wisata dalam kondisi baik/Total sarana dan prasarana di objek wisata x 100%	Persen	55	65	70	75	80	85	85	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Kopedagin	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UKM, Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Daerah
					5.3.3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pasar	5.1.5.3	Persentase pasar dalam kondisi baik	Jumlah pasar dalam kondisi baik/Total pasar x 100%	Persen	40.00	42.86	50.00	57.14	64.29	71.43	71.43	Dinas Kopedagin	Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		5.4	Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana	Persentase pemulihan infrastruktur pasca bencana	5.4.1	Meningkatnya efektivitas penanggulangan bencana	5.4.1.1	Persentase pemulihan infrastruktur pasca bencana	Jumlah penanganan bencana tahun n/Jumlah bencana yang terjadi tahun n x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BPBD	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		5.5	Terciptanya struktur ruang	Persentase luas lahan yang sesuai dengan peruntukannya	5.5.1	Meningkatnya kesesuaian pembangunan daerah terhadap RTRW	5.5.1.1	Persentase luas lahan yang sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Pembangunan daerah yang sesuai dengan struktur ruang tahun n/Total pembangunan tahun n x 100%	Persen	N/A	N/A	10	20	30	40	40	Dinas PUPR	Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Pengelolaan RTH, Program Penataan Perdesaan dan Perkotaan

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

ttd

**DOSMAR BANJARNAHOR**